

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan proses mensintesis dan menganalisis sumber-sumber yang relevan dengan topik penelitian yang dilakukan. Tinjauan pustaka dilakukan untuk memperdalam pemahaman topik penelitian, mengidentifikasi kelemahan penelitian sebelumnya, dan mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan yang masih perlu diselidiki.

Sumber yang digunakan dalam tinjauan pustaka dapat berupa artikel, buku, laporan penelitian, dokumen resmi, dan sumber informasi lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Saat melakukan tinjauan pustaka, peneliti sering kali melalui proses pemilihan sumber yang relevan. Tinjauan literatur secara menyeluruh merupakan langkah penting dalam proses penelitian yang membantu peneliti memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai topik penelitian, menemukan kesenjangan pengetahuan yang perlu diteliti, dan mengidentifikasi kelemahan dalam penelitian.

2.1.1 Hubungan Internasional

Hubungan internasional adalah segala interaksi aktor hubungan internasional yang melewati lintas-batas negara. Ini merupakan satu upaya yang harus dilakukan oleh seluruh negara di dunia, karena dinamika politik internasional terus berkembang dan masalah antarnegara pun semakin menggiring negara pada suatu bentuk ketergantungan satu sama lain (Asmiatyningsih & Darmayadi, 2021: 4).

Secara terminologi, Hubungan Internasional adalah sebuah interaksi yang terjadi melintasi batas negara yang dilakukan oleh aktor-aktor tertentu dengan segala kepentingannya dan ada sejumlah kebijakan yang berlaku dalam mengatur hubungan tersebut. Pada awal keberadaannya, pembahasan dan aktor dalam menjalin suatu hubungan dengan negara lain cenderung high politic dan tertutup. Hubungan internasional adalah studi mengenai pola-pola aksi dan reaksi di antara negara-negara berdaulat yang diwakili oleh elit-elit pemerintahan (Coulombis dan Wolfe, 2004: 24).

Teori Hubungan Internasional adalah seperangkat kerangka pemikiran yang digunakan untuk memahami, menjelaskan, dan menganalisis interaksi antara negara-negara dalam konteks global. Teori ini membantu dalam mengidentifikasi pola, dinamika, dan faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan antarnegara serta fenomena politik internasional secara lebih umum. Salah satu teori utama dalam Hubungan Internasional adalah Realisme.

Teori Realisme dikemukakan oleh berbagai pemikir seperti Hans Morgenthau, Kenneth Waltz, dan John Mearsheimer. Teori ini memiliki dasar pandangan yang mengakui realitas persaingan dan konflik sebagai bagian integral dari sistem internasional. Realisme menekankan pada kepentingan nasional, kekuasaan, dan ketidakpercayaan antarnegara. Teori ini berpendapat bahwa negara-negara bertindak berdasarkan perhitungan rasional atas keuntungan dan keamanan nasional mereka. Konflik dan persaingan antara negara-negara diasumsikan sebagai konsekuensi alami dari sistem internasional yang tidak memiliki otoritas pusat yang mengatur.

Dalam perspektif realisme, negara dianggap sebagai aktor utama dalam hubungan internasional, dan tujuan utama mereka adalah mempertahankan keamanan, kedaulatan, dan kepentingan nasional. Teori ini mengidentifikasi ancaman terhadap negara dan menekankan pada strategi untuk mempertahankan posisi dan kekuatan. Realisme juga membahas konsep keseimbangan kekuatan, di mana negara-negara mencari keseimbangan dalam sistem internasional untuk mencegah dominasi satu kekuatan yang dapat mengancam keamanan nasional.

Walaupun realisme memiliki pengaruh yang signifikan dalam analisis hubungan internasional, teori ini juga memiliki kritik. Beberapa kritikus menganggap realisme terlalu pesimis dan mengabaikan aspek kerjasama dan diplomasi dalam hubungan internasional. Selain itu, pendekatan realis cenderung mengabaikan faktor-faktor non-negara seperti organisasi internasional, aktor non-pemerintah, dan dinamika ekonomi global yang semakin penting dalam dunia yang semakin terhubung saat ini.

Penting untuk diingat bahwa teori Hubungan Internasional, termasuk Realisme, tidak hanya satu-satunya pendekatan dalam memahami hubungan internasional. Ada berbagai teori lain seperti Idealisme, Konstruktivisme, dan Feminisme yang juga memberikan wawasan yang berharga terhadap interaksi global. Kombinasi dan penggunaan berbagai teori ini membantu para analis dan pengambil keputusan untuk memahami kerumitan dinamika hubungan internasional secara lebih komprehensif.

Selain Realisme, salah satu teori lain yang juga memiliki dampak signifikan dalam analisis Hubungan Internasional adalah Idealisme atau juga dikenal sebagai

Liberalisme. Teori ini menekankan pada pentingnya kerjasama antarnegara, hukum internasional, dan institusi internasional dalam mencapai perdamaian dan kemajuan bersama. Pemikir seperti Immanuel Kant dan Woodrow Wilson merupakan tokoh-tokoh yang terkait dengan teori Idealisme.

Idealisme menganggap bahwa negara-negara memiliki potensi untuk bekerjasama dan mengatasi perbedaan melalui diplomasi, negosiasi, dan kerja sama multilateral. Teori ini menekankan pada nilai-nilai seperti perdamaian, hak asasi manusia, demokrasi, dan pembangunan ekonomi yang menjadi pijakan untuk mengurangi konflik dan menciptakan hubungan internasional yang lebih harmonis. Idealisme juga mendukung peran institusi internasional seperti PBB, WTO, dan organisasi regional dalam memfasilitasi kerjasama dan menyelesaikan sengketa.

Dalam pandangan Idealisme, perdamaian bukan hanya sekedar absennya konflik, tetapi juga adanya kondisi positif di mana negara-negara bekerjasama untuk menciptakan kondisi keamanan, keadilan, dan kesejahteraan bersama. Teori ini melihat pentingnya norma-norma dan nilai-nilai bersama dalam membentuk perilaku negara-negara dalam sistem internasional. Idealisme juga mengakui peran penting masyarakat sipil, organisasi non-pemerintah, dan individu dalam membentuk dinamika hubungan internasional.

Namun, Idealisme juga mendapatkan kritik, terutama terkait dengan ketidakrealistisan dalam mengabaikan konflik-konflik yang muncul karena perbedaan kepentingan dan kekuasaan. Beberapa kritikus menganggap Idealisme terlalu optimis dan mengabaikan kompleksitas dinamika politik internasional yang sering kali tidak sesuai dengan asumsi kerjasama tanpa hambatan.

Penting untuk diakui bahwa kedua teori ini, Realisme dan Idealisme, merupakan dua dari banyak pendekatan yang digunakan dalam analisis Hubungan Internasional. Penggunaan berbagai teori ini memungkinkan para peneliti, analis, dan pengambil keputusan untuk mendapatkan wawasan yang lebih lengkap dan beragam tentang kompleksitas interaksi global. Dalam prakteknya, gabungan antara berbagai teori ini membantu merumuskan strategi dan kebijakan luar negeri yang lebih komprehensif dan sesuai dengan dinamika dunia yang terus berkembang.

Hubungan internasional yang pada dasarnya merupakan studi mengenai interaksi lintas batas negara oleh state actor maupun non-state actor memiliki berbagai macam pengertian. Agung Banyu Perwita & Yanyan Mochamad Yani menyatakan bahwa:

“Hubungan Internasional merupakan bentuk interaksi antara aktor atau anggota masyarakat yang satu dengan aktor atau anggota masyarakat lain. Terjadinya Hubungan Internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar” (Perwita & Yani, 2005: 3-4)”.

Menurut *The Dictionary of World Politics*, hubungan internasional adalah istilah yang digunakan untuk melihat seluruh interaksi antara aktor-aktor negara dengan melewati batas-batas negara. Sedangkan McClelland mendefinisikan hubungan internasional secara jelas sebagai studi tentang interaksi antara jenis kesatuan-kesatuan sosial tertentu, termasuk studi tentang keadaan-keadaan relevan

yang mengelilingi interaksi. Hubungan internasional akan berkaitan dengan segala bentuk interaksi antara masyarakat negara-negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun warga negara. Hubungan internasional mencakup pengkajian terhadap politik luar negeri dan politik internasional, dan meliputi segala segi hubungan diantara berbagai negara di dunia (Perwita & Yani, 2005: 4).

Kemudian Mochtar Mas'ood lebih jauh menjelaskan dalam buku : Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi bahwa :

"tujuan utama studi hubungan internasional adalah untuk mempelajari perilaku internasional, yakni perilaku para aktor negara maupun non negara dalam area transaksi internasional. Perilaku itu dapat berwujud perang, konflik, kerjasama, pembentukan aliansi, interaksi dalam organisasi internasional dan sebagainya "(Mas'ood, 2002:29).

Hubungan internasional berawal dari kontak dan interaksi di antara negara-negara di dunia, terutama dalam masalah politik. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, isu-isu internasional ini mengalami banyak perkembangan. negara ataupun aktor non-negara mulai menunjukkan ketertarikannya akan isu-isu internasional di luar isu politik, seperti isu ekonomi, lingkungan hidup, sosial dan kebudayaan (Hadiwinata, 2007: 5).

Bidang sosial dan kebudayaan dapat masuk kedalam kajian ilmu hubungan internasional karena dalam penelitian ini hal yang dikaji adalah prioritas Jerman dalam meningkatkan pertukaran pendidikan dari Indonesia ke Jerman dan pengaruh penyebaran kebudayaan serta bahasa Jerman terhadap aspek sosial di Indonesia.

Dan Goethe-Institut berperan sebagai aktor yang menjembatani hubungan internasional di antara kedua negara tersebut.

2.1.2 Diplomasi

Diplomasi merupakan salah satu kajian utama dalam studi hubungan internasional. Dalam pendekatan tradisional, diplomasi didefinisikan sebagai sebuah seni bernegosiasi dengan negara lain. Diplomasi menjadi salah satu instrumen bagi politik luar negeri untuk dapat mencapai tujuan dan atau kepentingan nasionalnya. Salah satu tugas utama diplomasi adalah berusaha untuk menerapkan keinginan dan pikiran suatu pemerintah dan bangsa pada keinginan masyarakat negara yang didekati. Diplomasi memiliki kaitan yang erat dengan politik luar negeri yang dilakukan oleh pejabat-pejabat resmi yang terlatih (Djelantik, 2008: 113).

Teori diplomasi adalah kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami prinsip-prinsip, strategi, dan praktik-praktik yang terlibat dalam interaksi antarnegara melalui saluran diplomatik. Salah satu tokoh penting yang dikaitkan dengan pengembangan teori diplomasi adalah Harold Nicolson. Dalam bukunya yang berjudul "Diplomacy" yang diterbitkan pada tahun 1939, Nicolson menguraikan pemikiran-pemikiran mendasar mengenai diplomasi dan hubungannya dengan kebijakan luar negeri.

Teori diplomasi mengakui pentingnya negosiasi, dialog, dan diplomasi sebagai sarana untuk menyelesaikan konflik dan mencapai tujuan-tujuan politik dalam hubungan antarnegara. Ini melibatkan upaya untuk mempengaruhi keputusan dan tindakan negara lain melalui komunikasi yang efektif dan beradab.

Diplomasi sering kali merupakan alternatif yang lebih diinginkan daripada penggunaan kekuatan militer atau konflik bersenjata untuk menyelesaikan sengketa internasional. Teori diplomasi juga menyoroti pentingnya diplomasi sebagai alat untuk membangun dan memelihara hubungan bilateral dan multilateral yang positif antara negara-negara. Diplomasi membantu membangun kepercayaan, mempromosikan dialog yang terbuka, dan menciptakan saluran komunikasi yang memungkinkan negara-negara untuk berbagi pandangan dan kepentingan. Hal ini juga melibatkan penciptaan perjanjian internasional, perundingan perdagangan, dan kerjasama dalam berbagai bidang seperti lingkungan, kesehatan, dan keamanan. Namun, teori diplomasi juga mengakui tantangan dan keterbatasan dalam prakteknya. Diplomasi dapat menjadi rumit ketika melibatkan negosiasi antara negara-negara dengan kepentingan yang bertentangan atau ketika masalah yang diperdebatkan sangat sensitif. Selain itu, diplomasi juga dapat terpengaruh oleh dinamika kebijakan internal, opini publik, dan perubahan kepemimpinan.

Diplomasi memiliki peran penting karena diperlukannya strategi untuk promosi kerjasama dan peluang investasi (Putri & Ginanjar, 2018: 1) . Diplomasi publik, diplomasi digital, dan diplomasi melalui media sosial semakin menjadi bagian penting dari interaksi internasional. Para diplomat dan pemerintah juga harus mempertimbangkan kepentingan dan aspirasi masyarakat sipil, kelompok non-pemerintah, dan individu dalam proses diplomasi modern. Dalam keseluruhan, teori diplomasi memberikan landasan konseptual untuk memahami kompleksitas dan dinamika interaksi antarnegara melalui saluran diplomatik. Dengan melibatkan prinsip-prinsip dialog, kompromi, dan diplomasi yang beradab, teori ini

memberikan panduan bagi negara-negara untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama dan mengatasi perbedaan dalam skala global. Diplomasi menurut Geoff Berridge dan Alan James adalah penyelenggaraan hubungan antara negara-negara yang berdaulat melalui diplomat untuk mempromosikan negosiasi internasional (Berridge dan James, 2012: 69). Secara konvensional, pengertian diplomasi adalah usaha suatu negara dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasionalnya di dunia internasional (Roy, 1991: 9). Globalisasi dan revolusi teknologi yang terjadi dewasa ini telah membawa konsekuensi langsung pada praktek diplomasi. Revolusi teknologi yang menandai lahirnya abad ke-21 secara mendasar telah merubah tatanan dunia (Djelantik, 2008: 353).

2.1.2.1 Diplomasi Publik

Diplomasi publik dalam buku *public diplomacy* karya Mark Leonard mengatakan bahwa diplomasi publik merupakan sebuah cara untuk membangun hubungan dengan cara memahami kebutuhan, budaya, dan masyarakat; mengkomunikasikan pandangan; membenarkan mispersepsi yang ada dalam masyarakat internasional; mencari area dimana pemerintah dapat menemukan kesamaan pandangan (Leonard, 2002: 8).

Konsep diplomasi publik dapat dilihat dari sisi publik sebagai objek dan subjeknya. Publik sebagai objek, dalam artian publik di negara lain adalah objek atau tujuan dari diplomasi negara. Sedangkan publik sebagai subjek dalam artian publik di tataran domestik ikut serta dalam aktivitas diplomasi negara atau pemerintah (Effendi, 2013: 49).

Teori diplomasi publik, yang juga dikenal sebagai diplomasi masyarakat, adalah pendekatan dalam hubungan internasional yang menekankan pada interaksi langsung antara pemerintah dan masyarakat asing melalui berbagai saluran komunikasi. Konsep ini menganggap bahwa diplomat tidak hanya berurusan dengan pemerintahan dan diplomat dari negara lain, tetapi juga dengan masyarakat luas dari berbagai negara. Diplomasi publik bertujuan untuk membangun pemahaman, kepercayaan, dan hubungan positif dengan masyarakat internasional melalui pertukaran budaya, informasi, dan pandangan.

Salah satu tokoh yang mengemukakan konsep diplomasi publik adalah Joseph S. Nye Jr., seorang ilmuwan politik dan akademisi ternama dalam bidang hubungan internasional. Nye dikenal dengan konsep "kekuasaan lembut" (soft power), yang pertama kali diperkenalkannya pada tahun 1990-an. Dalam konsep ini, Nye menekankan bahwa negara dapat mempengaruhi perilaku dan pilihan aktor lain melalui daya tarik budaya, nilai-nilai, dan citra positif, bukan hanya dengan kekuatan militer atau ekonomi semata.

Diplomasi publik mencakup berbagai strategi dan alat komunikasi, termasuk seni, budaya, pendidikan, media, dan platform digital. Negara-negara dapat menggunakan seni dan budaya untuk mengenalkan kekayaan budaya mereka kepada dunia dan membangun ikatan emosional dengan masyarakat internasional. Melalui pertukaran pelajar dan program pendidikan, negara juga dapat membangun jaringan hubungan di antara generasi muda dari berbagai negara.

Media, baik media tradisional maupun platform digital, juga memainkan peran penting dalam diplomasi publik. Negara-negara dapat menggunakan media

sosial, situs web resmi pemerintah, dan saluran berita internasional untuk menyebarkan informasi, pandangan, dan kebijakan mereka secara luas kepada audiens global. Dalam hal ini, teknologi telah memberikan kemampuan yang lebih besar bagi negara-negara untuk berkomunikasi langsung dengan masyarakat internasional tanpa perantara.

Dalam era globalisasi dan teknologi informasi, diplomasi publik menjadi semakin relevan dan berperan penting dalam membangun hubungan antarnegara. Melalui pendekatan ini, negara dapat mengatasi perbedaan budaya, membangun pemahaman lintas batas, dan mempromosikan kepentingan nasional mereka di mata dunia dengan cara yang lebih luas dan inklusif.

Dalam pelaksanaan diplomasi publik, negara-negara dapat merancang strategi komunikasi yang tepat untuk mencapai tujuan mereka. Ini melibatkan pemilihan pesan yang relevan, penggunaan media yang efektif, dan pengelolaan citra yang positif. Selain itu, penting untuk memahami audiens target, budaya, dan konteks sosial di negara-negara yang menjadi sasaran diplomasi publik.

Diplomasi publik tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga melibatkan aktor non-pemerintah seperti lembaga pendidikan, budaya, bisnis, dan masyarakat sipil. Kolaborasi antara pemerintah dan sektor-sektor ini dapat menghasilkan upaya diplomasi publik yang lebih holistik dan beragam, serta lebih dekat dengan realitas kehidupan masyarakat di berbagai negara.

Namun, ada juga tantangan dalam praktik diplomasi publik. Salah satunya adalah kesenjangan antara pesan yang disampaikan oleh pemerintah dan persepsi masyarakat internasional terhadap negara tersebut. Jika citra negara tidak konsisten

dengan realitas atau terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang mencolok, upaya diplomasi publik bisa mengalami kesulitan dalam menciptakan dampak positif yang signifikan.

Implementasi dari diplomasi publik yang dilakukan oleh sebuah negara tentunya berbeda-beda. Diplomasi Publik merupakan kunci dalam implementasi apa yang disebut dengan Soft Diplomacy menjadi alat utama diplomasi sekarang ini. Perkembangan diplomasi di era globalisasi menjadikan Diplomasi Publik itu sendiri semakin beragam. Kecenderungan pelaksanaan Diplomasi Publik dengan menggunakan aplikasi Soft Diplomacy dianggap efektif dan efisien karena mudah untuk dilakukan tanpa menelan korban dan menghabiskan biaya besar. Seiring berubahnya paradigma aktor hubungan internasional, pelaksanaan Diplomasi Publik melibatkan berbagai kalangan aktor non-Pemerintahan. Oleh karena itu, Soft Diplomacy merupakan bentuk nyata dari penggunaan instrumen selain tekanan politik, militer, dan tekanan ekonomi. Maka dari itu, konsep politik luar negeri dilakukan melalui diplomasi publik (Yudhantara, 2011:183).

Diplomasi publik bertujuan menumbuhkan opini masyarakat yang positif di negara lain melalui interaksi dengan kelompok-kelompok kepentingan. Oleh karena itu, diplomasi publik mensyaratkan kemampuan komunikasi antarbudaya karena terkait dengan perubahan sikap masyarakat, saling pengertian dalam melihat persoalan-persoalan politik luar negeri. Di era informasi, pendapat masyarakat dapat secara efektif mempengaruhi tindakan pemerintah (Djelantik, 2004: 353)..

2.1.2.2 Diplomasi Kebudayaan

Definisi dari diplomasi budaya adalah sebagai sebuah pertukaran ide, informasi, seni, serta aspek kebudayaan lainnya dengan tujuan untuk menjaga sikap saling pengertian antara satu negara dengan negara lain maupun antar masyarakatnya (Cummings, 2003:1). Pendapat lain dari Tulus Warsito dan Wahyuni Kartikasari dalam bukunya yang berjudul *Diplomasi : Konsep dan Relevansi bagi Negara Berkembang, Studi Kasus Indonesia*, mendefinisikan diplomasi Kebudayaan sebagai berikut :

"Diplomasi kebudayaan adalah usaha suatu negara untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya melalui dimensi kebudayaan, baik secara mikro seperti pendidikan, ilmu pengetahuan, olahraga, dan kesenian, maupun secara makro sesuai dengan ciri-ciri khas yang utama, misalnya propaganda, dll, yang dalam pengertian konvensional dapat dianggap sebagai bukan politik, ekonomi, maupun militer. Beberapa literatur menyebutnya dengan propaganda" (Warsito & Kartikasari, 2007:4).

Teori diplomasi kebudayaan, juga dikenal sebagai diplomasi budaya atau diplomasi melalui budaya, adalah pendekatan dalam hubungan internasional yang menekankan penggunaan elemen budaya sebagai alat untuk membangun hubungan positif antara negara-negara. Teori ini mendasarkan diri pada gagasan bahwa budaya dapat menjadi jembatan untuk memahami dan menghormati perbedaan di antara berbagai bangsa, serta mempromosikan dialog dan kerjasama lintas budaya.

Salah satu tokoh yang dikaitkan dengan pengembangan teori diplomasi kebudayaan adalah Milton Cummings. Dalam karyanya yang berjudul "Cultural

Diplomacy and the United States Government: A Survey," Cummings menguraikan bagaimana pertukaran budaya, seni, pendidikan, dan program pertukaran pelajar dapat membantu membangun pemahaman dan persahabatan antara negara-negara, terlepas dari perbedaan politik atau ekonomi yang ada. Ia berpendapat bahwa diplomasi kebudayaan dapat menciptakan ikatan emosional yang lebih kuat dan memungkinkan komunikasi yang lebih terbuka di antara bangsa-bangsa.

Konsep diplomasi kebudayaan juga dikenal dengan istilah "soft power," yang diartikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi dan memenangkan hati serta pikiran orang lain melalui daya tarik budaya dan nilai-nilai yang dimiliki suatu negara. Teori ini menekankan bahwa ketika suatu negara mampu memproyeksikan budaya yang menarik dan positif, hal itu dapat memperkuat pengaruh dan citra positif negara tersebut di mata masyarakat internasional.

Dalam praktiknya, diplomasi kebudayaan melibatkan berbagai kegiatan seperti pameran seni, pertukaran budaya, konser musik, festival film, penyebaran bahasa, dan program pertukaran pelajar. Misalnya, program seperti pemberian beasiswa untuk studi di luar negeri atau pendirian pusat kebudayaan di negara lain dapat menjadi sarana yang efektif untuk memperkenalkan budaya suatu negara kepada masyarakat internasional.

Diplomasi kebudayaan juga bisa mengambil bentuk kolaborasi antara pemerintah, lembaga budaya, dan sektor swasta dalam rangka mempromosikan identitas budaya suatu negara. Perusahaan media dan hiburan juga memiliki peran yang signifikan dalam diplomasi kebudayaan, karena film, musik, dan program

televisi memiliki daya tarik global yang besar dan dapat menciptakan citra positif suatu negara.

Selain itu, dalam era digital dan teknologi informasi saat ini, diplomasi kebudayaan telah mengalami pergeseran ke ranah online. Konten budaya dapat dengan mudah diakses oleh publik global melalui internet, platform media sosial, dan saluran digital lainnya. Negara-negara semakin menggunakan platform digital untuk mempromosikan budaya mereka, seperti melalui kampanye media sosial, pembuatan situs web interaktif, dan siaran langsung acara budaya.

Pengukuran efektivitas juga menjadi bagian penting dalam penelitian lebih lanjut. Bagaimana kita dapat mengukur dampak dari kegiatan diplomasi kebudayaan terhadap pemahaman, persepsi, dan hubungan antarbangsa? Pengumpulan data dan analisis lebih lanjut diperlukan untuk mengidentifikasi metode evaluasi yang efektif dan relevan.

Dalam kesimpulan, teori diplomasi kebudayaan menekankan pentingnya penggunaan elemen budaya untuk membangun hubungan dan mempromosikan citra positif suatu negara di mata masyarakat internasional. Teori ini memberi penekanan pada daya tarik budaya sebagai alat diplomasi yang kuat dan dapat memperkuat pengaruh suatu negara di kancah global. Namun, dalam implementasinya, penting untuk memahami sensitivitas budaya dan menghindari konflik serta melibatkan pengukuran efektivitas untuk memastikan tujuan diplomasi kebudayaan tercapai dengan baik.

Kegiatan yang dilakukan untuk tujuan diplomasi kebudayaan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, melainkan dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga

seperti Lembaga Swadaya Masyarakat, masyarakat, individu-individu, termasuk warga negara. Lebih lanjut Warsito dan Kartikasari mengelompokkan diplomasi kebudayaan menjadi dua, yaitu diplomasi kebudayaan makro dan diplomasi kebudayaan mikro.

Secara umum kebudayaan makro yang diungkapkan oleh Warsito dan Kartikasari adalah segala hasil dan upaya budidaya manusia terhadap lingkungan, sehingga dapat diartikan kebudayaan merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang kemudian dapat dipelajari untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya. Sedangkan diplomasi kebudayaan mikro merupakan hasil dari diplomasi kebudayaan makro, berupa pendidikan, ilmu pengetahuan, olahraga dan kesenian (Warsito dan Kartikasari, 2007:2-19). Terdapat beberapa tujuan dari diplomasi kebudayaan yaitu: pendidikan, ilmu pengetahuan, olahraga dan kesenian (Warsito dan Kartikasari, 2007:2-19). Terdapat beberapa tujuan dari diplomasi kebudayaan yaitu:

1. Tujuan diplomasi kebudayaan lebih luas dari pada pertukaran kebudayaan, misalnya mengirim utusan ke luar negeri untuk memperkenalkan kebudayaan satu negara ke negara lain.
2. Membangun pengetahuan baru dan kepekaan terhadap negara lain untuk mewujudkan hubungan yang lebih baik antara masyarakat dengan bangsanya.
3. Mempengaruhi pendapat masyarakat negara lain guna mendukung suatu kebijakan luar negeri tertentu.

Diplomasi budaya tergolong dalam bahasan Soft Power sebagai suatu kekuatan politik yang dipengaruhi budaya, nilai, ide sebagai sisi lain dari hard power yang menggunakan kekuatan militer.

Terdapat tiga kriteria mengapa diplomasi budaya menjadi nilai penting dalam teori hubungan internasional. Pertama, untuk mengurangi intensitas kekuatan militer pasca perang dingin, budaya dipandang sebagai sebuah bentuk kekuatan baru dalam hubungan internasional.

Kedua, setiap Negara bangsa juga harus membangun dasar dan batas jaringan non sekuritas dalam hal mempertahankan identitas bangsa. Budaya yang terdiri dari berbagai aspek menjadi identitas suatu Negara di mata internasional.

Ketiga, diplomasi budaya juga bisa menjadi alasan kuat dalam hal membentuk sebuah sistem internasional baru, baik berupa organisasi regional maupun global. Kemudian Warsito menjelaskan konsep-konsep diplomasi kebudayaan, dilihat dari bentuk, tujuan dan sarana nya, adalah sebagai berikut:

1. Eksibisi atau pameran merupakan bentuk diplomasi paling konvensional mengingat gaya diplomasi modern adalah diplomasi secara terbuka.
2. Propaganda, merupakan penyebaran informasi mengenai kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, maupun nilai-nilai sosial ideologis suatu bangsa.
3. Kompetisi, berupa olahraga, kontes kecantikan, ataupun kompetisi ilmu pengetahuan dan lain sebagainya.
4. Penetrasi, merupakan salah satu bentuk diplomasi yang dilakukan melalui bidang-bidang perdagangan, ideologi, dan militer.

5. Negosiasi, dalam lingkungan budaya negosiasi dilakukan sebelum negosiasi tersebut dilaksanakan, karena lingkungan budaya tersebut akan mempengaruhi cara pengambilan keputusan dalam suatu negosiasi yang akan dilaksanakan.
6. Pertukaran Ahli, merupakan salah satu jenis dari hasil negosiasi. Pertukaran ahli mencakup masalah kerjasama pertukaran budaya secara luas, yakni dari kerjasama beasiswa antar negara, sampai dengan pertukaran ahli dalam bidang tertentu (Warsito & Kartikasari, 2013 : 37-38).

Sarana diplomasi dibagi menjadi dua, yaitu, infrastruktur yang meliputi Elektronik, audio visual, dan media cetak dan suprastruktur yang meliputi Pariwisata, paramiliter, pendidikan, kesenian, perdagangan, opini publik, dan olahraga. Sedangkan cara diplomasi kebudayaan dibagi menjadi dua, yaitu secara langsung melalui kesepakatan bilateral, multilateral, konvensi internasional, dan secara tidak langsung, melalui negara ketiga atau melalui lembaga internasional. Dari segi tujuan, diplomasi kebudayaan ini biasanya bertujuan untuk mencari pengakuan, penyesuaian, bujukan, hegemoni atau subversi. Melalui tujuan-tujuan tersebut, saran yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan diplomasi tersebut adalah melalui pariwisata, olahraga, pendidikan, perdagangan, dan juga kesenian. (Warsito & Kartikasari, 2013 : 21-20).

Kemudian, dijelaskan pula ada dua pendekatan yang dipakai oleh negara negara berkembang dalam hubungannya terhadap kebudayaan modern dunia, yaitu yang pertama melalui konsep bipolaritas, atau dikotomi global dalam hal ini kebudayaan modern dunia yang digolongkan hanya dalam 2 (dua) kelompok, yakni

maju dan berkembang, atau modern dan tradisional. Bahwa posisi negara yang sedang berkembang berada dibawah negara-negara maju, sehingga terdapat ketergantungan antara negara berkembang terhadap negara maju untuk mensejajarkan posisinya. Yang kedua, pendekatan Spektrum Perkembangan Kebudayaan, menjelaskan bahwa pusat kebudayaan modern di negara yang sedang berkembang sesungguhnya merupakan budaya dari pinggiran yang berpola kepada pusat-pusat budaya modern dunia (Warsito & Kartikasari, 2007 : 33-35).

2.1.3 *Nation Branding*

Reputasi suatu negara mempengaruhi seluruh interaksinya dengan dunia luar. Dalam konteks perdagangan, investasi dan pariwisata, reputasi suatu negara mempengaruhi bagaimana warganya diperlakukan ketika bepergian ke luar negeri untuk belajar, bekerja atau berbisnis. Jika pemerintah berusaha meningkatkan reputasi negara, berarti pemerintah melakukan pelayanan yang baik kepada warganya. Oleh karena itu, menjadi tugas setiap pemerintah untuk berupaya membangun citra negaranya di luar negeri. Reputasi negara asal menjadi semakin penting di pasar global, terutama ketika masyarakat mendapat kesan bahwa semua produk itu identik. Menurut (Imran, 2017), *National Branding* diartikan sebagai

“seperangkat teori dan penerapannya yang bertujuan untuk mengukur, membangun dan mengelola reputasi suatu negara (selanjutnya disebut *building teritorial branding*). Secara definisi, tugas *national branding* adalah membangun, mengembangkan, dan menjaga citra (reputasi) negara yang baik. Teori ini didasarkan pada pengamatan dan penelitian yang menunjukkan bahwa keberhasilan suatu negara di pasar global sangat dipengaruhi oleh citra mereknya. Faktanya, ada

yang berpendapat bahwa merek dan citra suatu negara – serta menerjemahkan citra tersebut ke dalam produk yang dihasilkannya – sama pentingnya dengan produk yang diproduksi oleh negara tersebut.”

Menurut (Holt & Cameron, 2010), branding nasional adalah sebuah masalah, bukan solusi. Opini publik percaya bahwa merek-merek nasional dan sebagian besar negara harus berusaha membalikkan tren opini publik internasional mengenai merek-merek nasional, daripada mempromosikan pandangan-pandangan ini. Pemerintah harus membantu dunia memahami realitas, kompleksitas, kekayaan dan keragaman alam, sejarah, warisan, produk, sumber daya manusia, dan bentang alam, sehingga tidak hanya menjadi merek semata.

Ide merek nasional benar-benar menjadi angin segar bagi banyak pemerintah di suatu negara. Perpaduan dua kata “negara” dan “merek” bergaung karena branding suatu tempat pada hakikatnya merupakan pusat kemajuan dan kesejahteraan manusia. Ketika dunia menjadi pasar tunggal, proses globalisasi yang sedang berlangsung berarti bahwa negara, kota, dan wilayah harus bersaing dengan negara atau kota lain untuk mendapatkan pangsa pasar dalam perdagangan, politik, dan nilai, masyarakat, dan transaksi. Dalam lingkungan seperti itu, seperti di pasar produk, citra produk menjadi faktor penentu atau jalan pintas yang diperlukan untuk mengambil keputusan pembelian yang tepat. Pengaruh merek nasional terlihat jelas. Terdapat argumen ekonomi dan politik yang kuat tentang pentingnya mengidentifikasi, memahami, memantau, dan pada akhirnya mempengaruhi citra suatu tempat. (Post, 2005) merangkumnya sebagai identitas yang bersaing. Pada

dasarnya, jika negara mempunyai citra yang baik maka segala sesuatunya akan menjadi lebih mudah.

Ketika produk buatan negara ini dikirim ke luar negeri, citra negara tersebut seolah-olah sampai ke negara tersebut tepat sebelum produk tersebut. Hal ini membuka pintu, menciptakan kepercayaan, rasa hormat, dan meningkatkan harapan terhadap kualitas, kompetensi, dan kejujuran (Prsetia, 2015).

2.1.4 *Soft Power*

Konsep *soft power* pertama kali diperkenalkan oleh Joseph S. Nye di tahun 1990. Konsep *power* sendiri menurut Nye adalah kemampuan dalam hal mempengaruhi orang lain untuk melakukan apa yang kita inginkan. Terdapat tiga cara dalam mengeksekusi *power*, yaitu: memaksa lewat ancaman, membujuk dengan memberikan bayaran, atau yang terakhir dengan menarik perhatian atau memikat hati. Dua yang pertama dinamakan *hard power*, yakni ditandai dengan penggunaan kekuatan militer maupun ekonomi, sedangkan yang ketiga disebut dengan *soft power*. Nye mendefinisikan *soft power* sebagai kemampuan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan dari orang lain dengan cara memunculkan ketertarikan (*attraction*) dibandingkan melakukan paksaan (*coercion*) atau bayaran (*payments*), *soft power* ini terletak pada kemampuan suatu pihak dalam membentuk preferensi pihak lain (Nye, 2004: 46).

Dalam konsep *soft power*, Joseph Nye membedakan antara dua jenis kekuatan utama dalam hubungan internasional, yaitu *hard power* dan *soft power*. *Hard power* mengacu pada penggunaan kekuatan militer atau ekonomi untuk mempengaruhi dan mendominasi negara lain. Sedangkan *soft power* menekankan

daya tarik yang lebih halus melalui budaya, diplomasi kebudayaan, ideologi, nilai-nilai, dan citra positif. Dengan kata lain, *soft power* mengedepankan kemampuan untuk meyakinkan dan mempengaruhi orang lain melalui ketertarikan dan simpati, bukan melalui ancaman atau tekanan.

Salah satu contoh yang sering diambil dalam konteks *soft power* adalah pengaruh *Hollywood* dalam mempromosikan budaya Amerika dan nilai-nilai demokrasi melalui film dan hiburan. Musik, film, teknologi, gaya hidup, dan kebijakan luar negeri suatu negara juga dapat menjadi elemen-elemen yang mempengaruhi persepsi dan opini masyarakat internasional terhadap negara tersebut. *Soft power* berusaha untuk menciptakan legitimasi dan daya tarik sehingga negara-negara lain secara sukarela mengikuti pandangan dan kebijakan yang diusulkan.

Penting untuk diakui bahwa konsep *soft power* tidak berdiri sendiri, tetapi sering bekerja berdampingan dengan *hard power*. Negara-negara yang memiliki kombinasi yang efektif antara *hard power* dan *soft power* akan memiliki pengaruh yang lebih kuat di dunia internasional. Namun, *soft power* juga memiliki keterbatasan, terutama dalam situasi ketika nilai-nilai atau budaya suatu negara tidak sepenuhnya diterima oleh masyarakat internasional.

Dalam rangka mengembangkan *soft power*, suatu negara perlu berinvestasi dalam diplomasi kebudayaan, pendidikan, pertukaran budaya, serta mempromosikan budaya dan nilai-nilai yang positif di kancah internasional. Namun, *soft power* juga memerlukan kesesuaian antara retorika dan tindakan nyata

suatu negara, karena citra positif yang dibangun harus didukung oleh kebijakan-kebijakan yang konsisten dengan nilai-nilai yang diusung.

Secara keseluruhan, konsep *soft power* yang dikemukakan oleh Joseph Nye memberikan pandangan yang kaya tentang bagaimana suatu negara dapat mempengaruhi dunia internasional melalui daya tarik budaya, nilai-nilai, dan citra positif. *Soft power* dapat menjadi alat yang kuat dalam membangun reputasi, mendapatkan dukungan, dan mempengaruhi pandangan serta perilaku masyarakat internasional terhadap suatu negara. Namun, untuk sukses dalam menerapkan *soft power*, suatu negara perlu memiliki konsistensi antara retorika dan tindakan, serta berinvestasi dalam diplomasi kebudayaan dan upaya lain yang dapat meningkatkan daya tarik dan pengaruhnya di dunia internasional.

Soft power yang dimiliki oleh suatu negara, pada dasarnya, bergantung pada tiga sumber utama, yakni: budaya (dimana orang merasa tertarik terhadapnya), nilai-nilai politis/*political values* (ketika orang merasakannya, baik itu di dalam maupun luar negeri), dan terakhir kebijakan luar negeri (ketika orang melihatnya sebagai suatu legitimasi dan mempunyai otoritas moral). Budaya adalah kumpulan nilai-nilai dan kebiasaan (praktek) yang mempunyai arti bagi sebuah masyarakat. Budaya memiliki banyak manifestasi, dan dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu *high culture*, seperti sastra, seni, dan edukasi yang biasa ditujukan bagi kalangan elit; dan *popular culture* yang diperuntukkan bagi masyarakat secara umum (massal). Apabila budaya suatu negara memiliki nilai universal serta mempromosikan *values* dan *interest* yang di-*share* bersama, maka budaya tersebut

dapat meningkatkan *desired outcomes*-nya karena daya tarik yang tercipta (Nye, 2004: 73).

Mempromosikan image positif suatu negara bukanlah sesuatu yang baru. Namun di era sekarang, kondisi untuk merancang sebuah *soft power* telah mengalami transformasi, begitu juga dengan konteks internasional yang telah berubah dengan revolusi informasi dan globalisasinya. Nye berargumen bahwa konteks sangat menentukan dampak dan hasil suatu *soft power*, terlepas dari sumber mana *soft power* tersebut berasal. Dan memang dibandingkan dengan *hard power*, *soft power* lebih banyak bergantung pada konteks, dan terhadap adanya kemauan dari sang penerima (*receiver*). Oleh karenanya, *soft power* tidaklah konstan, namun sesuatu yang dapat berubah-ubah berdasarkan waktu, tempat, dan kondisi (Nye, 2004: 51)..

2.1.5 Kepentingan Nasional

Teori kepentingan nasional dalam hubungan internasional mengacu pada pandangan bahwa negara bertindak berdasarkan kepentingan-kepentingan nasional mereka sendiri. Para ahli Hubungan Internasional telah mengemukakan berbagai pendekatan terhadap teori ini.

Realisme adalah salah satu aliran teori yang menekankan pada kepentingan nasional sebagai faktor utama dalam perilaku negara. Menurut realisme klasik yang dikembangkan oleh Hans Morgenthau, negara memiliki kepentingan-kepentingan dasar seperti keamanan, kekuasaan, dan kelangsungan hidup, dan mereka akan berusaha untuk melindungi dan memperjuangkan kepentingan nasional mereka melalui kebijakan-kebijakan luar negeri yang rasional.

Namun, ada juga pendekatan liberalisme yang melihat kepentingan nasional sebagai lebih fleksibel dan dapat dikendalikan oleh faktor-faktor seperti nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan kerjasama internasional. Pendekatan liberal menganggap bahwa negara dapat mencapai kepentingan nasional mereka melalui kerjasama dan pembentukan lembaga-lembaga internasional yang memfasilitasi perdamaian dan kerja sama global.

Selain itu, teori konstruktivisme menyoroti peran identitas nasional dalam membentuk kepentingan nasional. Para konstruktivis berpendapat bahwa identitas, norma, dan pandangan dunia yang berbeda memainkan peran penting dalam menentukan kepentingan nasional. Kepercayaan, pandangan, dan interpretasi terhadap dunia luar membentuk persepsi negara tentang kepentingan-kepentingan mereka.

Dalam pandangan teori kepentingan nasional, negara dianggap sebagai aktor utama yang bertindak berdasarkan kepentingan nasional mereka sendiri. Meskipun ada perbedaan pendekatan dan penekanan, teori ini menyediakan kerangka pemahaman untuk menganalisis interaksi antara negara-negara dalam arena internasional dan memahami dinamika kebijakan luar negeri yang dipengaruhi oleh kepentingan nasional.

Teori kepentingan nasional adalah sebuah konsep dalam hubungan internasional yang mendasarkan bahwa negara-negara bertindak atas dasar pertimbangan kepentingan nasional yang merupakan motivasi utama dalam menjalankan kebijakan luar negeri. Konsep ini mengemukakan bahwa negara-

negara berperilaku rasional dengan fokus pada pemenuhan kepentingan-kepentingan yang dianggap penting untuk keberlangsungan dan keamanan negara.

Konsep kepentingan nasional telah dikemukakan oleh berbagai ahli dan teoretikus hubungan internasional. Salah satu tokoh yang memiliki kontribusi besar dalam pengembangan teori ini adalah Hans Morgenthau dengan aliran realis dalam hubungan internasional. Morgenthau menekankan bahwa negara adalah aktor utama dalam arena internasional yang bertujuan untuk melindungi dan memperluas kepentingan nasionalnya. Kepentingan nasional sering kali mencakup faktor-faktor seperti keamanan, ekonomi, politik, dan prestise.

Dalam teori kepentingan nasional, negara mengambil tindakan berdasarkan evaluasi rasional terhadap konsekuensi-konsekuensi yang mungkin terjadi terhadap kepentingan nasionalnya. Tindakan luar negeri dan kebijakan internasional diarahkan untuk memaksimalkan manfaat dan meminimalkan risiko terhadap kepentingan-kepentingan tersebut. Konsep ini mencerminkan realitas bahwa dalam dunia internasional yang kompleks dan beragam, negara-negara berinteraksi untuk melindungi dan mempromosikan kepentingan nasional mereka.

Secara keseluruhan, teori kepentingan nasional memberikan pandangan tentang cara negara-negara berinteraksi di dunia internasional dengan fokus pada pemenuhan dan perlindungan kepentingan nasional. Konsep ini membantu menjelaskan mengapa negara-negara mengambil keputusan-keputusan tertentu dalam hubungan internasional dan bagaimana kepentingan nasional menjadi faktor sentral dalam pembentukan kebijakan luar negeri suatu negara.

Penting untuk diingat bahwa teori kepentingan nasional juga memiliki kritik dan batasannya. Kritik terhadap konsep ini datang dari aliran-aliran teori lain dalam hubungan internasional, seperti liberalisme dan konstruktivisme, yang menganggap bahwa faktor-faktor selain kepentingan nasional, seperti nilai-nilai universal dan kerjasama internasional, juga memainkan peran penting dalam hubungan antarnegara.

Dalam prakteknya, konsep kepentingan nasional dapat menghadapi tantangan dalam mengatasi perbedaan pandangan internal dalam sebuah negara. Tidak semua kepentingan dianggap sama pentingnya oleh berbagai kelompok di dalam negara tersebut. Selain itu, interpretasi mengenai apa yang merupakan "kepentingan nasional" bisa bervariasi tergantung pada konteks politik dan sosial suatu negara.

Dalam konteks global yang terus berkembang, konsep kepentingan nasional tetap menjadi landasan penting dalam analisis hubungan internasional. Namun, penting untuk memahami bahwa interpretasi dan aplikasi konsep ini dapat bervariasi, tergantung pada perspektif teoretis dan konteks tertentu. Konsep kepentingan nasional tetap relevan dalam membantu kita memahami motivasi dan tindakan negara-negara dalam dunia internasional yang kompleks dan dinamis.

Kepentingan nasional sangat penting untuk menjelaskan dan memahami perilaku internasional. Konsep kepentingan nasional merupakan dasar untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri suatu negara. Menurut May Rudy, kepentingan nasional yaitu :

“Kepentingan nasional (*national interest*) merupakan tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan hal yang dicita-citakan, dalam hal ini kepentingan nasional yang relatif tetap sama di antara semua negara atau bangsa adalah keamanan (mencakup kelangsungan hidup rakyatnya dan kebutuhan wilayahnya) serta kesejahteraan (*prosperity*), serta merupakan dasar dalam merumuskan atau menetapkan kepentingan nasional bagi setiap negara” (Rudy, 2002: 116).

Kepentingan nasional juga dapat diartikan sebagai tujuan mendasar serta faktor paling menentukan yang memandu para pembuat keputusan dalam merumuskan kebijakan atau politik luar negeri. Kepentingan nasional merupakan konsepsi yang sangat umum tetapi merupakan unsur yang menjadi kebutuhan vital bagi suatu negara, karena mencakup kelangsungan hidup bangsa dan negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan, militer, kesejahteraan dan ekonomi (Plano & Olton, 2000: 7). Eksistensi suatu negara akan tetap berlangsung selama tercapainya kepentingan-kepentingan negaranya. Kepentingan-kepentingan negara tersebut tidak hanya dapat dipenuhi dalam satu ruang lingkup domestik saja, akan tetapi melalui kerangka hubungan antar negara. Ide kepentingan nasional mengacu pada perangkat ideal dari tujuan-tujuan nasional yang harus ditemukan sebagai dasar dari hubungan luar negeri dan politik luar negeri negara tersebut. Kepentingan nasional merupakan sebuah dasar pokok dalam menentukan suatu kebijakan serta merupakan kriteria dalam upaya menentukan tindakan dan langkah yang akan diambil oleh suatu pemerintahan, baik dalam lingkup nasional maupun internasional (Plano & Olton, 2000: 7).

2.2 Kerangka Pemikiran

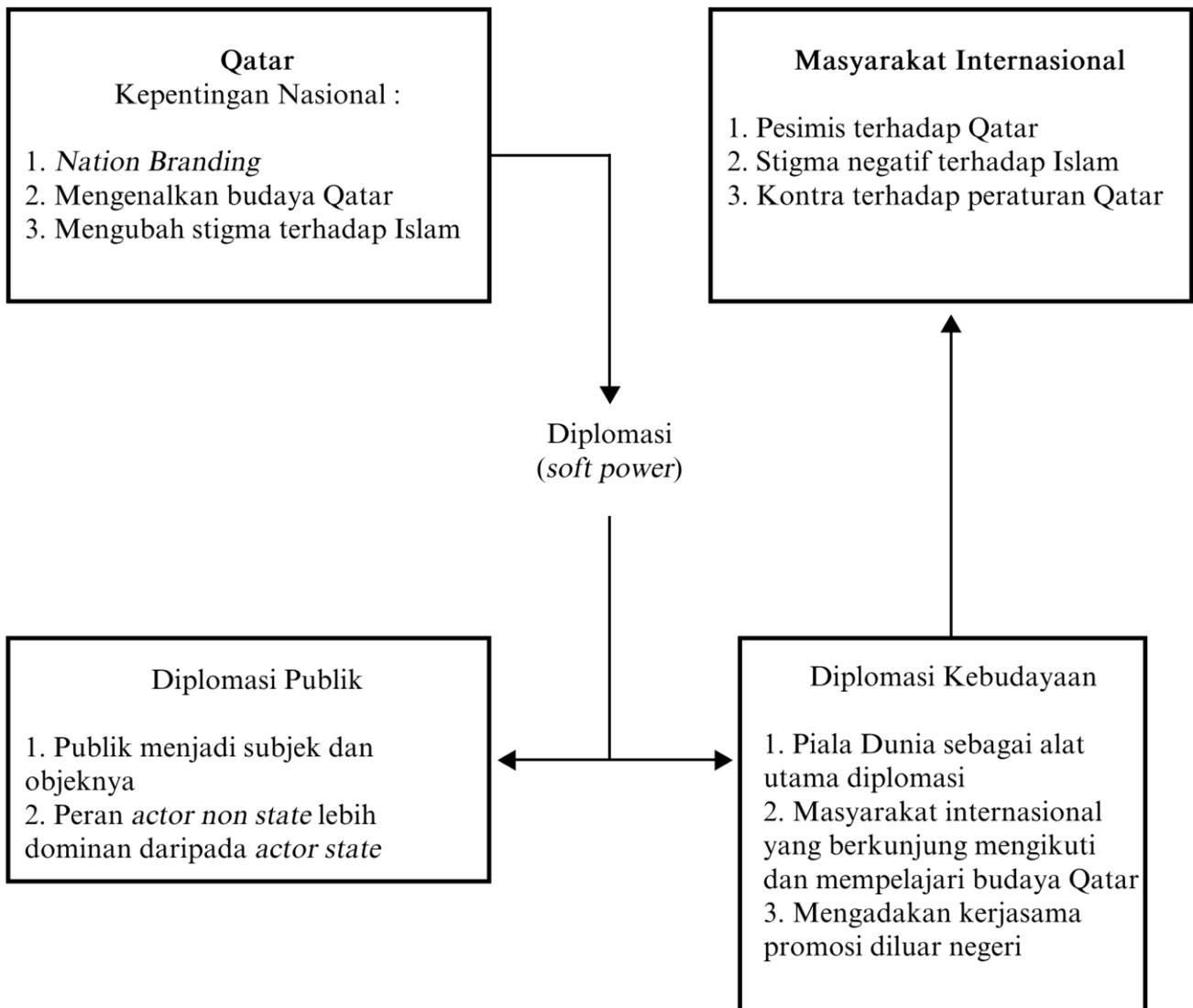
Hubungan internasional diketahui sebagai interaksi antara sesama negara atau aktor negara. Qatar dalam hal ini mengambil kesempatan untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia tentunya untuk meningkatkan sektor pariwisata di negaranya. Selain itu, Qatar juga ingin membuktikan bahwa peraturan-peraturan yang berlaku di Qatar bukan merupakan peraturan yang negatif melainkan peraturan tersebut berdasarkan ajaran agama islam yang mereka yakini.

Suatu negara melakukan diplomasinya ke negara lain dalam rangka memenuhi kepentingan nasionalnya. Sama seperti Qatar kepada masyarakat internasional yang berkunjung saat Piala Dunia 2022. Qatar mengenalkan budaya Islami yang damai dengan tujuan ingin meluruskan pandangan masyarakat internasional kepada agama islam yang cenderung negatif. Infrastruktur yang baik dan memadai juga menandakan keseriusan Qatar untuk menyelenggarakan ajang besar ini yang dapat mematahkan kepesimisan masyarakat internasional terhadap penyelenggaraan Piala Dunia di Timur Tengah.

Dari penyelenggaraan Piala Dunia 2022 dapat diketahui bahwa Qatar menggunakan konsep *soft power* dalam upaya promosi dan mengundang ketertarikan terhadap budaya Qatar tanpa adanya paksaan sama sekali. Masyarakat internasional yang berkunjung ke Qatar akan secara otomatis mengikuti peraturan dan kebudayaan yang berlaku disana.

Apabila dilihat dari objeknya, diplomasi yang dilakukan Qatar melalui penyelenggaraan Piala Dunia termasuk ke dalam diplomasi publik. Dalam hal ini interaksi masyarakat Qatar dengan masyarakat internasional bersinggungan langsung, dimana interaksi ini dapat terjadi pertukaran ide, informasi, serta aspek

kebudayaan lainnya. Masyarakat internasional yang berkunjung pastinya mempelajari budaya Qatar seperti bahasa, kesenian, sejarah dll.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

